

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa pemerintahan Soeharto, Indonesia menggunakan sistem sentralistik dalam politik dan pemerintahan, sebagai peran utama dalam pembangunan nasional yang dipegang oleh pemerintah pusat secara otoriter. Dalam perkembangannya pemerintah pusat memegang pembangunan, sedangkan pemerintah daerah hanya dijadikan pelengkap saja. Dalam hal ini terjadi pengendalian dan perencanaan terpusat yang mengharuskan adanya penyeragaman sistem organisasi pemerintah daerah dan manajemen proyek yang dikembangkan oleh daerah, penerapan pemerintahan yang terpusat ini bisa menghasilkan keadaan yang kuat terhadap ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pada bidang politik, partisipasi masyarakat dibungkam dimana dijadikan sebagai objek politik saja, sehingga demokrasi omong kosong penguasa yang tidak pernah terwujud di lapangan (Waris, 2012).

Sejak memasuki era reformasi pada tahun 1998, ada permintaan untuk mengubah sistem sentralisasi menjadi demokrasi. Desentralisasi dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah, mengurangi tindakan korupsi, memperkuat demokrasi, serta mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat terhadap pemerintah yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi pemerintahan. Desentralisasi ini mendorong pemerintah untuk menjadi lebih bertanggung jawab, transparan, dan responsif, dengan perubahan ini dimulai dari tingkat pemerintah daerah. Terutama,

nilai-nilai yang ditekankan adalah partisipasi yang lebih luas dalam proses perbaikan sistem yang sudah lama terpusat. Melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. (Harsasto,2020).

Harapannya, desentralisasi akan mendorong keterlibatan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, pada kenyataannya, desentralisasi justru menimbulkan isu seperti fenomena dinasti politik, yang mencerminkan dominasi kekuasaan politik di daerah oleh sekelompok individu yang memiliki hubungan keluarga atau darah. Meluasnya politik dinasti yang ada di Indonesia pertanda munculnya para raja kecil yang memperluas kekuasaan politiknya melalui hubungan kekerabatan (Sujarwanto, 2015). Selain itu, tantangan desentralisasi yang dihadapi oleh Indonesia adalah korupsi, desentralisasi tidak hanya mentransfer sumber daya lebih banyak dari pusat. Namun, ada banyak individu yang berperan dalam menentukan penggunaan sumber daya tersebut. Di beberapa daerah, terdapat ciri khas berupa keberadaan elit lokal yang memiliki pengaruh besar, serta adanya neo-patronisme dan hubungan patronase (Haryanto, 2016).

Pemekaran adalah salah satu bentuk dari upaya desentralisasi yang mewujudkan otonomi daerah dan prinsip demokrasi, sambil meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Konsekuensi dari desentralisasi ini adalah mendorong berbagai daerah untuk bersaing dalam proses pemekaran, yang pada gilirannya mengakibatkan perkembangan politik lokal yang dinamis dan mendorong munculnya berbagai kontestasi lokal yang menarik. Ini memberikan

kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihan pemimpin di wilayah mereka sendiri.

Pilkada berfungsi sebagai alat untuk mengatur pergantian kekuasaan, sementara juga berperan sebagai forum evaluasi atas kepemimpinan selama lima tahun oleh masyarakat. Pemilu dalam praktiknya adalah proses untuk memilih individu yang akan mengisi berbagai jabatan politik, termasuk presiden, gubernur, bupati/wali kota, dan wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan. Pilkada langsung dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pemilihan daerah secara langsung. Pendekatan Pilkada langsung adalah suatu bentuk perancangan lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat daerah. Konsep inti dari Pilkada memang sangat ideal, dimana warga setempat memiliki peran dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Dalam perkembangan selanjutnya, seperti yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disusun aturan yang memungkinkan kandidat independen (calon perseorangan) untuk ikut serta dalam Pilkada setelah memenuhi persyaratan tertentu (J.Setiawan, 2021).

Kontestasi demokrasi dalam bentuk pilkada langsung terasa semakin jauh dari jangkauan masyarakat. Beberapa Permasalahan yang terjadi didalam pilkada antara lain, money politik, dinasti politik, politik klientelisme, dan premanisme. Kekuasaan hanya akan dapat diraih oleh kalangan yang ekonominya diatas rata-rata karena biaya pada politik yang semakin mahal. Perlahan proses politik memerlukan

biaya mahal menjadi sebuah kewajaran sehingga politik uang menjadi hal lumrah dalam proses demokrasi. Lemahnya kaderisasi dalam partai membuat kondisi semakin parah dimana dinamika kepartaian bisa dikalahkan dengan kader yang memiliki uang untuk maju ke dalam kontestasi demokrasi, kader harus memiliki finansial yang mencukupi untuk mencalonkan diri dan berani maju dalam kontestasi politik. Jika hal ini terus terjadi proses politik akan menjadi sangat mahal karena pemilih akan lebih suka saat partai memakai pendekatan transaksional. Pola patron klien sudah lazim dilakukan saat pilkada, dimana patron yang memiliki kekuatan bisa mendorong massa untung mendukung calon saat pilkada (Nastain & Nugroho, 2022).

Salah satu contoh dampak desentralisasi yaitu Pemekaran Wilayah Pangandaran yang memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis. Pemekaran Kabupaten Pangandaran berlandaskan Undang-undang nomor 21 tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November tahun 2012. Kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada tanggal 17 November tahun 2012, dan hari jadi ditetapkan pada 25 Oktober 2012.

Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis pada 24 Agustus 2015 menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pangandaran. Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 menjadi pemilihan kepala daerah pertama di Kabupaten Pangandaran setelah pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Tiga pasangan calon Bupati-Wakil Bupati yang berpartisipasi dalam pemilihan ini adalah Pasangan H. Ino Darsono - Erwin Thamrin, Pasangan Hj. Azizah Talita Dewi

- Sulaksana, dan Pasangan H. Jeje Wiradinata - H. Adang Hadari. Pasangan H. Jeje Wiradinata - H. Adang Hadari meraih jumlah suara terbanyak dalam pemilihan tersebut. Untuk mendapatkan informasi lebih rinci mengenai jumlah suara yang diperoleh oleh ketiga calon, dapat diidentifikasi melalui data yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Hasil Perolehan Suara pada Pilkada Kabupaten Pangandaran di Desa Pangandaran Tahun 2015

No	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1.	H. Ino Darsono – Erwin Thamrin	613
2.	Hj. Azizah Talita Dewi – Sulaksana	1853
3.	H. Jeje Wiradinata – H. Adang Hadari	3.707

Sumber: <http://www.lawupost.com/2015/10/308663-dpt-siap-mensukseskan-pilkada.html>

Tabel 1.2 Tabel Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran di Desa Pangandaran Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Jeje Wiradinata dan Ujang Endin	3.433
2	Adang Hadari dan Supratman	2.746

Sumber: KPU Kabupaten Pangandaran

Dengan hasil ini, Jeje Wiradinata dan Ujang Endin mereka menjadi pemenang dalam Pilkada tahun 2020. Pelaksanaan pilkada di Kecamatan Pangandaran tepatnya di desa Pangandaran, pasangan nomor urut 1 Jeje Wiradinata dan Ujang Endin memperoleh suara sebanyak 3.433, sedangkan pasangan nomor urut 2 Adang Hadari dan Supratman memperoleh suara sebanyak 2.746. Kemenangan ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada Jeje-Adang untuk memimpin Kabupaten Pangandaran, terutama karena Pilkada tersebut hanya dilaksanakan dalam satu putaran.

Hal yang menarik dari pemilihan di Pangandaran tahun 2015 dan 2020 adalah Jeje Wiradinata dua kali unggul dan memenangkan pilkada di Desa Pangandaran. Kemenangan pada Jeje Wiradinata tidak lepas dari kekuatan para penguasa dengan memanfaatkan para pengepul untuk mendapatkan akses politik dalam kampanye mereka. Para pengepul mengkampanyekan pasangan calon bupati, namun kampanye yang dilakukan pengepul tidak menggunakan paksaan atau tekanan. Tetapi pengepul memanfaatkan hubungan yang dimiliki hubungan kekerabatan dengan nelayan, karena nelayan merasa membutuhkan pengepul maka mereka membalas kebaikan pengepul. Salah satunya dengan memberikan suaranya kepada paslon yang dikampanyekan oleh pengepul. Hubungan Patronklien ini selalu terjadi saat pilkada berlangsung bisa menjadikan kebiasaan dan penyakit oleh masyarakat pada setiap pilkada akan berlangsung. Selain itu eksistensi Jeje selama berpolitik mendapat perhatian dan dianggap sukses dalam menjalankan tugasnya sebagai politisi.

Di lingkungan pedesaan, hubungan patron-klien telah mengalami perkembangan, di mana kepemilikan lahan memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat kecil dan memiliki potensi untuk menguasai kekayaan, pengaruh politik, sistem pendidikan, serta akses kepada sumber daya komunikasi dengan luar. (Nastain, 2011). Inti dari hubungan antara patron dan klien sebenarnya adalah untuk menjamin subsistensi dan keamanan sosial. Apabila dasar pertukaran yang menjadi fondasi hubungan antara patron dan klien mengalami penurunan dan tidak lagi memberikan jaminan dasar bagi kelangsungan hidup dan keamanan, maka klien akan menganggap hubungan tersebut sebagai tidak berkeadilan dan memanfaatkan.

Permasalahan yang terdapat pada masyarakat pesisir yang seharusnya dituntaskan. Bukan malah dijadikan bahan untuk kampanye saat pilkada. Praktik patron klien bahkan bisa terjadi pada proses pilkada terutama pada masyarakat yang tinggal di pedesaan dan pesisir. Pada pemilihan kepala daerah, pola hubungan patronase yang ada di dalam masyarakat telah menghambat pada pilkada yang demokratis yang menjunjung tinggi terhadap kebebasan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik patronase muncul dalam pilkada biasanya saat kampanye berlangsung, dukungan yang berasal dari masyarakat didasarkan atas kesadaran bukan hanya ketertundukan (Ramli, 2016).

Data jumlah nelayan dan buruh nelayan di Kabupaten Pangandaran sebanyak 2.817. Jumlah nelayan terbanyak pada 2021, di Kecamatan Pangandaran berjumlah 1.151. Di desa Pangandaran masyarakat yang bekerja sebagai nelayan berjumlah 643 hal ini berdasarkan data dari desa Pangandaran. Sedangkan Jumlah Pengepul di Pangandaran hanya 13 orang. Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan perekonomiannya bersumber dari hasil tangkapan di laut. Nelayan biasanya menangkap ikan dan melakukan pembudidayaan untuk memenuhi kehidupan mereka, kemudian hasil tangkapan mereka dan hasil budidaya akan dijual kepada pengepul. Menurut salah satu pengepul yang ada di Desa Pangandaran, pengepul akan memberikan pinjaman modal kepada nelayan yang membutuhkan seperti uang, tempat ikan, dan es balok.

Selain itu pengepul menyediakan kebutuhan lain untuk para nelayan guna terpenuhinya kebutuhan sehari-hari nelayan dan kebutuhan mendadak seperti sakit, biaya sekolah anak, dan konsumtif. Hasil penangkapan ikan dan pembudidayaan

nelayan akan dijual kepada pengepul dan hasil dari penjualan akan langsung dipotong oleh pengepul untuk membayar hutang nelayan. Karena terpenuhinya kebutuhan nelayan makan akan timbul sikap menghargai dan komitmen untuk membantu patron dengan jasa dan tenaga yang mereka miliki. Hubungan yang terjadi antara nelayan dan pengepul menjadi hubungan yang tidak setara dan tidak adil tetapi saling membutuhkan. Hubungan keduanya bisa berlangsung lama jika keduanya menemukan kesesuaian dan manfaatnya.

Masyarakat yang sudah memiliki hak untuk terlibat dalam pemilihan menjadi sasaran perebutan oleh kelompok elit dengan tujuan untuk memenangkan kandidat yang mereka dukung. Saat Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di desa pangandaran, pengaruh pengepul (patronase) yang mengalir kuat ke masyarakat, sehingga mereka yang bekerja sebagai nelayan (Klien) membuktikan kesetiaannya dengan cara memilih kandidat tersebut. Patron masih memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran apabila para pasangan calon kepala daerah melakukan berbagai cara pendekatan dan strategi untuk mendapatkan dukungan dari para elit dan penguasa, dengan harapan akan menggunakan pengaruhnya untuk memilih sang paslon kepala daerah. Para kandidat dalam mendekati patron agar memberikan dukungan terhadap dirinya, dengan cara dijanjikan jabatan ketika terpilih. Pola seperti ini adalah strategi yang dilakukan dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pangandaran. Para Patron menjadi sasaran kampanye paling strategis yang ada di Desa Pangandaran saat pilkada atas kemenangan calon.

Calon kepala daerah sudah mempersiapkan strategi politik pada Pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020, untuk memenangkan pilkada. Salah satunya melakukan pendekatan kepada tokoh yang dianggap memiliki peranan yang cukup penting dalam masyarakat yaitu melakukan pendekatan kepada patron untuk memperoleh kemenangan. Kekuatan dengan melakukan pendekatan kepada patron bisa mendongkrak popularitas kandidat pasangan kandidat.

Selain karena kekuatan penguasa dengan menggunakan para pengepul untuk mendapatkan suara, hal ini disebabkan pada pilkada 2015 Jeje Wiradinata memiliki reputasi di kalangan masyarakat sebagai seorang pemimpin yang setia dan aktif berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu, dia juga diakui sebagai tokoh yang terkenal dengan prestasi politiknya, termasuk perannya sebagai anggota DPRD, Ketua DPRD Ciamis, Ketua DPC Ciamis, dan posisinya sebagai Wakil Bupati Ciamis pada tahun 2012. Selama menjabat Jeje dianggap mampu menjalankan tugasnya sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu peran Jeje Wiradinta dalam Komunitas KUD Minasari dalam membangkitkan kembali dari keadaan yang sulit hingga berkembang menjadi lebih baik. Selain itu peran Jeje membentuk Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pangandaran. Dimana Jeje merupakan seorang ketua dari HNSI tersebut. Dikenal sebagai sosok anak dari seorang nelayan membuat beliau sangat dikenal di kalangan nelayan. Hal ini juga lah yang membuat suara Jeje saat pilkada di Kabupaten Pangandaran khususnya di Desa Pangandaran bisa meraih kemenangan suara.

Menurut salah satu informan dalam kegiatan pra penelitian informan yang berasal dari salah satu pengepul yang ada di desa Pangandaran mengatakan bahwa, saat pilkada berlangsung memang terdapat pasangan calon yang meminta bantuan untuk memperoleh suara dari nelayan di Desa Pangandaran. Kemudian cara para pengepul untuk mendapat dukungan dengan menggunakan pendekatan kepada nelayan dengan melalui obrolan santai. Selain itu pengepul mengatakan bahwa Jeje sudah dikenal lama dan eksistensinya yang luar biasa di kalangan nelayan karena beliau pernah menjabat sebagai ketua himpunan nelayan Pangandaran.¹

Pelaksanaan pilkada masyarakat yang sudah memiliki hak untuk terlibat dalam pemilihan menjadi sasaran perebutan oleh kelompok elit dengan tujuan untuk memenangkan kandidat yang mereka dukung. Saat pilkada di desa Pangandaran, pengaruh pengepul (patronase) yang mengalir kuat ke masyarakat, sehingga mereka yang bekerja sebagai nelayan (Klien) membuktikan kesetiaannya dengan cara memilih kandidat tersebut. Patron masih memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran apabila para pasangan calon kepala daerah melakukan berbagai cara pendekatan dan strategi untuk mendapatkan dukungan dari para elit dan penguasa, dengan harapan akan menggunakan pengaruhnya untuk memilih sang paslon kepala daerah. Caloncalon berusaha mendekati patron dengan harapan mendapatkan dukungan.

Pola seperti ini adalah strategi yang dilakukan dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pangandaran. Para Patron menjadi sasaran kampanye paling strategis yang ada di Desa Pangandaran saat pilkada untuk kemenangan calon. Tim

¹ Wawancara pada 9 april 2023

sukses Jeje dalam Pilkada 2020 melakukan strategi dengan pendekatan secara personal kepada pengepul dan nelayan, selain itu seringkali dengan menawarkan janji akan memberikan kemudahan dalam membuat surat izin untuk pengepul, serta kartu anggota untuk nelayan. Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya nelayan dan pengepul bisa saja tidak lagi memilih paslon kepala daerah berdasarkan hubungan patronase. Untuk itu Jeje Wiradinata dalam menjaga kekuasaannya menempatkan istrinya di periode selanjutnya sebagai bupati Pangandaran. Hal ini lah yang menjadi perbincangan karena dinasti politik.

Penelitian yang memiliki kesamaan dengan yang akan diteliti adalah studi yang dilakukan oleh M. Ramli pada tahun 2016. Studi tersebut mencakup kemenangan calon kepala desa di Desa Jojjolo dan mengidentifikasi bentuk patronase dalam pemilihan kepala desa yang terkait dengan aspek ekonomi dan politik. Dalam aspek ekonomi, patron adalah individu yang memiliki kekayaan dan keterampilan yang sangat diperlukan oleh masyarakat petani sebagai klien mereka. Dampak dari hubungan patron-klien terhadap partisipasi pemilih di Desa Jojjolo mencakup:

- a) Pengaruh suara dalam pemilihan kepala desa berlangsung karena tokoh masyarakat (patron) terlibat secara aktif dalam kompetisi politik dengan memberikan dukungan kepada calon kepala desa (pilkades) di Desa Jojjolo. Interaksi ini menciptakan dinamika timbal balik di mana klien menyatakan rasa terima kasih atas bantuan yang mereka terima sebagai bentuk apresiasi.
- b) Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dalam pemilihan kepala desa disebabkan oleh rasa klien, yaitu masyarakat petani, yang merasa berhutang

budi atas bantuan yang diberikan oleh patron. Ini mendorong klien untuk aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Fadli Ichsan (2016), penelitian ini mengenai hubungan patron-klien dalam pemilihan Kepala Desa yang pengaruh sangat kuat dalam pemenangan calon kepala desa. Dikarenakan pola hubungan yang dimiliki antara tuan tanah dan masyarakat sangatlah kuat. Ada beberapa elemen yang memperkuat hubungan yang akrab antara patron dan klien, termasuk kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat, sehingga pemilik tanah di desa memberikan dukungan kepada mereka. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik juga berdampak pada dinamika ini. Terakhir, kurangnya kemunculan tokoh baru di masyarakat menyebabkan legitimasi tokoh-tokoh masyarakat tetap terkait dengan pemahaman bahwa dominasi berperan sebagai kekuatan utama. Cara pandang dan tindakan masyarakat seringkali dipengaruhi oleh kecenderungan untuk mengikuti pola pikir yang telah ditetapkan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada.

Rekha Adji Pratama (2017). Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat pola patronase dan klientelisme yang tampak jelas dalam relasi antara politisi, birokrat, dan masyarakat. Dalam konteks ini, walikota secara aktif memanfaatkan mesin birokrasi sebagai alat untuk memperoleh keuntungan politik dengan tujuan memastikan bahwa anaknya berhasil memenangkan pemilihan walikota Kendari yang berlangsung serentak pada tahun 2017. Penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek. Pertama, terkait dengan hubungan yang terbentuk di dalam birokrasi, yang meliputi penentuan karir dan jabatan dalam lingkup birokrasi di Kendari. Aspek pertama ini bertujuan untuk

mengkonsolidasikan dukungan dari birokrasi guna memenangkan tujuan tertentu. Kedua, terkait dengan hubungan yang dibangun di masyarakat, yang mencakup mobilisasi suara melalui praktik Vote Buying dan Penggunaan Dana Desa. Aspek kedua ini merupakan strategi untuk memperoleh dukungan atau suara dengan melibatkan aparat birokrasi sebagai perantara dalam memobilisasi suara dari masyarakat.

Penelitian ini mengenai “Relasi Patronase Pengepul-Nelayan dalam Pemenangan Pemilihan Bupati Pangandaran Tahun 2020” untuk mengetahui pola hubungan patron klien yang terjadi antara pemilik modal dan nelayan yang selalu dimanfaatkan oleh para calon kepala daerah khususnya pasangan Jeje Wiradinata dan Ujang Endin atas kemenangannya pada Pilkada 2020 di kabupaten Pangandaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat didalam latar belakang maka permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pola relasi patronase antara nelayan dan pengepul dalam kemenangan pilbup Pangandaran di Desa pangandaran tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diuraikan bahwasanya dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana relasi sosial dan ekonomi antara nelayan dan pengepul di desa Pangandaran, dan melihat relasi yang terjadi antara nelayan dan pengepul pada pilbup Pangandaran tahun 2020.

2. Untuk mengetahui pola hubungan patron klien yang terjadi antara pemilik modal dan nelayan yang selalu dimanfaatkan oleh para calon kepala daerah khususnya pada Pilkada 2020 di kabupaten Pangandaran dalam mendapatkan suara.
3. Untuk mengetahui bentuk patronase di pilkada Pangandaran 2020 di Desa Pangandaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penyelesaian penelitian ini akan memberikan manfaat yang luas kepada berbagai pihak, di antaranya adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Referensi kajian-kajian selanjutnya mengenai politik lokal di Kabupaten Pangandaran.
- b. Memberikan suatu pengetahuan mengenai relasi yang terjadi antara nelayan-pengepul saat menjelang pilkada
- c. Dapat menjadi suatu saran atau masukan kedepannya saat akan menjelang pemilihan kepala daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari hasil penelitian ini secara praktis diharapkan, dapat menjadi:

- a. Dapat menjadi suatu pandangan yang terbaru dalam proses pilkada kedepannya.
- b. Mengetahui bagaimana hubungan yang terjadi selama ini antara nelayan dan pengepul dalam sosial; ekonomi, dan politik.

- c. Mengetahui bahwa adanya proses patronase dalam pemilihan bupati bisa menjadi bahan perbaikan untuk kedepannya.